Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 1 tahun 2026.
Ramlan Alan, et all : 28 - 36
© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2026
E-ISSN: 3089-3453
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.82

PERAN STRATEGI KOMUNIKASI SOSIAL KODAM VI DALAM PENANGGULANGAN *DESTRUCTIVE FISHING:* IMPLIKASI KEBIJAKAN TERHADAP KELESTARIAN TERUMBU KARANG DI KEPULAUAN SANGKARRANG, MAKASSAR

[1]Ramlan Alan, [2]Achmad Faisol, [3]Krino Hadi Susanto
[1,2,3] Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut
Email koresponden: alanmelda270780010588@gmail.com

Submitted: 13 April 2026 ; Revised: 10 July 2026 ; Accepted: 29 July 2026

Abstract

This study aims to analyze the role of the social communication strategy of Kodam VI in addressing destructive fishing practices and its policy implications for coral reef sustainability in the Sangkarrang Islands, Makassar. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving purposively selected informants, including Kodam VI personnel, local government officials, and fishing communities. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the social communication strategy, implemented through persuasive, participatory, and territorial approaches, has successfully increased public awareness and understanding of the negative impacts of destructive fishing. However, behavioral change among the community has not been fully achieved due to economic constraints and limited alternative livelihoods. This study concludes that social communication strategies play a significant role in supporting policy implementation for combating destructive fishing and preserving coral reef ecosystems, but require integrated policy support and sustainable community empowerment.

***Keywords**: social communication, destructive fishing, communication strategy, public policy, coral reefs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategi komunikasi sosial Kodam VI dalam penanggulangan praktik *destructive fishing* serta implikasi kebijakan terhadap kelestarian terumbu karang di Kepulauan Sangkarrang, Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi aparat Kodam VI, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi sosial yang dilakukan secara persuasif, partisipatif, dan berbasis

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2026 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.82

pendekatan teritorial mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif *destructive fishing*. Namun demikian, perubahan perilaku masyarakat belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan keterbatasan alternatif mata pencaharian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi sosial memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung implementasi kebijakan penanggulangan *destructive fishing* dan pelestarian terumbu karang, namun perlu didukung oleh sinergi kebijakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: komunikasi sosial, destructive fishing, strategi komunikasi, kebijakan publik, terumbu karang

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Kerusakan ekosistem laut, khususnya terumbu karang, menjadi salah satu isu lingkungan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Salah satu penyebab utama kerusakan tersebut adalah praktik *destructive fishing*, seperti penggunaan bahan peledak dan racun, yang tidak hanya merusak habitat laut tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Kepulauan Sangkarrang di Makassar merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius terkait praktik ini, mengingat kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi sekaligus tekanan aktivitas penangkapan ikan yang intensif. Kondisi ini menuntut adanya upaya terpadu yang tidak hanya bersifat penegakan hukum, tetapi juga pendekatan persuasif melalui komunikasi sosial yang efektif(Zuhri et al., 2024).

Peran Komando Daerah Militer (Kodam) VI menjadi penting sebagai bagian dari unsur pertahanan teritorial yang memiliki fungsi pembinaan wilayah, termasuk dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Strategi komunikasi sosial yang dilakukan oleh Kodam VI tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga membangun kesadaran, partisipasi, dan perubahan perilaku masyarakat pesisir agar meninggalkan praktik *destructive fishing*. Melalui pendekatan yang humanis dan berbasis kearifan lokal, komunikasi sosial

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2026 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.82

diharapkan mampu menjembatani kepentingan antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut (Nurul Widya Salsabillah, 2024).

Namun demikian, efektivitas strategi komunikasi sosial dalam penanggulangan *destructive fishing* masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya terkait bagaimana strategi tersebut dirancang, diimplementasikan, serta direspon oleh masyarakat di lapangan. Selain itu, penting untuk menganalisis sejauh mana strategi tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan perilaku dan penurunan praktik penangkapan ikan yang merusak. Hal ini menjadi krusial mengingat kompleksitas faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi tindakan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber daya laut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategi komunikasi sosial Kodam VI dalam penanggulangan *destructive fishing* serta mengkaji implikasi kebijakan yang dihasilkan terhadap kelestarian terumbu karang di Kepulauan Sangkarrang, Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan studi komunikasi strategis dan kebijakan publik, serta menjadi rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga ekosistem laut.

METODE / METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam peran strategi komunikasi sosial Kodam VI dalam penanggulangan *destructive fishing* di Kepulauan Sangkarrang, Makassar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara *purposive*, seperti aparat Kodam VI,

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2026 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.82

pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan teknik *coding* dan triangulasi untuk menjaga validitas data.

Adapun teori yang digunakan meliputi teori strategi komunikasi untuk menganalisis perencanaan dan pelaksanaan komunikasi, teori komunikasi sosial untuk melihat interaksi dan pembentukan kesadaran masyarakat, serta teori perubahan perilaku **dan** difusi inovasi untuk menjelaskan proses perubahan sikap nelayan terhadap praktik penangkapan ikan. Selain itu, teori kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan digunakan untuk mengkaji implikasi kebijakan terhadap upaya pelestarian terumbu karang secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN / RESEARCH FINDING AND DISCUSSION

Pembahasan penelitian ini mengungkap bahwa strategi komunikasi sosial yang dilaksanakan oleh Kodam VI memiliki peran yang cukup komprehensif dalam upaya penanggulangan *destructive fishing* di Kepulauan Sangkarrang, Makassar, terutama melalui pendekatan teritorial yang menekankan kedekatan emosional dan sosial dengan masyarakat pesisir. Implementasi komunikasi dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti sosialisasi langsung, penyuluhan, pembinaan masyarakat, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh agama sebagai opinion leader. Dalam perspektif teori strategi komunikasi, efektivitas ini ditentukan oleh keselarasan antara komunikator (aparat Kodam VI yang memiliki kredibilitas tinggi), pesan (edukasi tentang dampak kerusakan terumbu karang), media (tatap muka dan komunikasi interpersonal), serta karakteristik khalayak (masyarakat nelayan dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi tertentu). Temuan menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi interpersonal lebih efektif

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2026 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.82

dibandingkan media formal, karena mampu membangun kepercayaan (*trust building*) dan membuka ruang dialog yang lebih intensif.

Dalam kerangka teori komunikasi sosial**,** interaksi yang berkelanjutan antara aparat Kodam VI dan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan makna sosial secara kolektif. Kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan secara rutin telah menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, seperti keterlibatan dalam pengawasan wilayah laut dan pelaporan aktivitas ilegal. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi dua arah yang dialogis dan partisipatif, yang pada akhirnya memperkuat norma sosial baru yang menolak praktik *destructive fishing*. Dengan demikian, komunikasi sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat sosialisasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Dari sudut pandang teori perubahan perilaku (Theory of Planned Behavior)**,** perubahan sikap dan perilaku nelayan terjadi secara bertahap. Peningkatan pengetahuan mengenai dampak negatif *destructive fishing* membentuk sikap yang lebih positif terhadap pelestarian lingkungan. Norma subjektif terbentuk melalui tekanan sosial dari komunitas dan tokoh masyarakat yang mulai menolak praktik ilegal tersebut. Sementara itu, kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) meningkat seiring adanya alternatif solusi seperti edukasi teknik penangkapan ramah lingkungan dan pengawasan yang lebih ketat dari aparat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi masih menjadi hambatan utama, dimana sebagian nelayan tetap tergoda menggunakan cara instan karena hasil yang lebih cepat dan besar, sehingga perubahan perilaku belum sepenuhnya merata.

Lebih lanjut, berdasarkan teori difusi inovasi *(Everett Rogers)***,** strategi komunikasi sosial Kodam VI dapat dipahami sebagai upaya menyebarluaskan

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2026 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.82

inovasi berupa praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Proses difusi terjadi melalui tahapan pengetahuan (*knowledge*), persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Kelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, seperti nelayan muda dan yang memiliki akses informasi lebih baik, cenderung menjadi *early adopters*, sedangkan kelompok lainnya masih berada pada tahap pertimbangan. Keberhasilan difusi sangat dipengaruhi oleh peran agen perubahan (aparat Kodam dan tokoh masyarakat), saluran komunikasi yang digunakan, serta kesesuaian inovasi dengan kebutuhan masyarakat. Namun, keterbatasan dukungan ekonomi dan fasilitas menjadi faktor penghambat dalam mempercepat adopsi inovasi tersebut.

Dalam perspektif teori kebijakan publik**,** strategi komunikasi sosial ini memiliki implikasi strategis terhadap efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan *destructive fishing*. Komunikasi yang baik mampu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi, mengurangi resistensi, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Selain itu, komunikasi sosial juga berperan sebagai jembatan antara kebijakan yang bersifat top-down dengan kondisi riil di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih adaptif dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan elemen penting dalam siklus kebijakan, khususnya pada tahap implementasi dan evaluasi.

Akhirnya, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan**,** hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi komunikasi sosial Kodam VI berkontribusi terhadap upaya menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Penurunan praktik *destructive fishing* berdampak positif terhadap kelestarian terumbu karang sebagai penopang ekosistem laut, yang pada jangka panjang juga mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat nelayan. Namun demikian, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan integrasi antara strategi

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2026 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.82

komunikasi dengan kebijakan ekonomi, seperti pemberdayaan masyarakat dan penyediaan alternatif mata pencaharian. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan *destructive fishing* tidak hanya bergantung pada komunikasi semata, tetapi juga pada sinergi antara pendekatan sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI / CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi sosial yang dilaksanakan oleh Kodam VI memiliki peran penting dalam penanggulangan praktik *destructive fishing* di Kepulauan Sangkarrang, Makassar. Pendekatan komunikasi yang bersifat persuasif, partisipatif, dan berbasis kedekatan teritorial terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang. Keberhasilan ini didukung oleh kredibilitas komunikator, penggunaan komunikasi interpersonal yang efektif, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi.

Namun demikian, efektivitas strategi komunikasi sosial tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mengubah perilaku seluruh masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat, terutama kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada praktik penangkapan ikan yang instan, serta keterbatasan alternatif mata pencaharian. Selain itu, proses difusi inovasi terkait praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan masih berlangsung secara bertahap dan belum merata di seluruh kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi sosial Kodam VI memberikan kontribusi positif terhadap implementasi kebijakan penanggulangan *destructive fishing* dan upaya pelestarian terumbu karang. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada sinergi antara komunikasi, kebijakan publik, serta

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2026 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.82

dukungan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi

1. **Penguatan Strategi Komunikasi Sosial**

   Kodam VI perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, baik interpersonal maupun berbasis teknologi, serta memperkuat pesan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat pesisir.
2. **Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan**

   Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Kodam VI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penanggulangan *destructive fishing* secara terpadu.
3. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

   Pemerintah perlu menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi nelayan, seperti pengembangan ekowisata, budidaya perikanan, atau pelatihan keterampilan lainnya, guna mengurangi ketergantungan pada praktik penangkapan ikan yang merusak.
4. **Penguatan Edukasi dan Perubahan Perilaku**

   Program edukasi lingkungan perlu dilakukan secara kontinu dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda sebagai agen perubahan untuk mempercepat proses adopsi perilaku ramah lingkungan.
5. **Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan**

   Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk mengukur efektivitas strategi komunikasi sosial serta dampaknya terhadap penurunan praktik *destructive fishing* dan peningkatan kelestarian terumbu karang.

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2026 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v3i1.82

REFERENSI / REFERENCE

Cangara, Hafied. (2017). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Effendy, Onong Uchjana. (2007). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rogers, Everett M. (2003). *Diffusion of Innovations (5th Edition)*. New York: Free Press.

Ajzen, Icek. (1991). *Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Aristyavani, Inadia. (2021). *Komunikasi Risiko: Konsep, Teori, dan Strategi*. Bandung: Rosda.

Iswadi. (2025). *Komunikasi Digital*. Jakarta: Qriset Indonesia.

Olifia, Sandra, dkk. (2025). *Komunikasi Persuasif*. Literasi Langsung Terbit.

Faustyna & Rudianto. (2022). *Strategi Komunikasi Krisis*. Yogyakarta: Andi.

McQuail, Denis. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.

Nurul Widya Salsabillah, S. Z. Y. S. (2024). Analisis Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital di Jakarta: Metode E-Governance Quality (E-Govqual) dan Importance Performance Analysis (IPA) (Digital-Based Service Quality Analysis in Jakarta: E-Governance Quality (E-Govqual) and Importance Performance Analysis (IPA) Methods). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *7*(2), 163–173.

Zuhri, S., Pramitasari, A., & Rozikin, I. (2024). THE ROLE OF ACTORS IN ACCELERATING STUNTING REDUCTION IN INDONESIA: A PENTAHELIX PERSPECTIVE. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, *18*(4), 1–10. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-069